

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA PANGAN)**

Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 11
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perum BULOG
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Kamis, 14 September 2017
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Membahas Subsidi Pangan pada RKA-K/L Tahun 2018
Ketua Rapat : Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo
Hadir : A. 27 Anggota dari 50 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Perum BULOG:
1. Drs. Djarot Kusumayakti, MM. (Direktur Utama);
2. Dr. Wahyu Suparyono, AK., CA., MM. (Direktur SDM dan Umum);
3. Iryanto Hutagaol, SE., MBA. (Direktur Keuangan);
4. Dr. Febriyanto, SE., M.Comm., MTQM(Hons) (Direktur Komersil);
5. Ir. Imam Subowo, MM. (Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri); dan
beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Direktur Utama Perum BULOG dalam rangka membahas Subsidi Pangan pada RKA-K/L Tahun 2018, pada hari Kamis tanggal 14 September 2017, dibuka pukul 11.00 WIB oleh Ketua Rapat Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI menerima laporan atas realisasi serapan gabah/beras Perum BULOG hingga tanggal 11 September 2017 sebesar 1.827.596 ton dari target serapan Tahun 2017 yaitu sebesar 3.737.019 ton dan penyaluran Rastra hingga tanggal 12 September 2017 sebesar 1.667.750 ton atau setara dengan 65,19% dari alokasi Pagu Tahun 2017 sebesar 2.558.294 ton.
2. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan Pagu Subsidi Pangan pada APBN Tahun 2018 sebesar **Rp21.667.900.328.800,-** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Subsidi Rastra sebesar **Rp18.497.152.807.200,-** yang meliputi:
 - Sasaran : 14.332.212 RTS
 - Alokasi : 15 kg/RTS/bulan
 - Durasi Penyaluran : 12 bulan/12 kali
 - HPP GKG : Rp4.650,-
 - HPP Beras : Rp7.300,-
 - HPB : Rp8.770,-/kg
 - Harga tebus : Rp1.600,-/kg
 - Subsidi harga : Rp7.170,-/kg
 - b. *Margin Fee* sebesar **Rp670.747.521.600,-** yang terdiri dari:
 - Kuantum Raskin : 2.579.798.160 kg
 - Tarif *Margin* : Rp260,-/kg
 - c. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar **Rp2.500.000.000.000,-**.Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan membahas dengan komisi terkait dan lintas sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Komisi IV DPR RI tidak menyetujui pengurangan besaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) dari 14.332.212 RTS pada Tahun 2017 menjadi 5.645.150 RTS pada Tahun 2018 yang dialihkan menjadi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan BPNT Tahun 2017.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.40 WIB.

DIREKTUR UTAMA
PERUM BULOG,

Ttd.

DRS. DJAROT KUSUMAYAKTI, MM.

KOMISI IV DPR RI
KETUA RAPAT,

Ttd.

DR. IR. E. HERMAN KHAERON, M.Si.

A-419

4. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Subsidi Pangan sebesar **Rp9.836.436.940.000,-** berdasarkan Nota Keuangan Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Subsidi Rastra sebesar **Rp7.285.630.590.000,-** yang meliputi:
 - Sasaran : 5.645.150 RTS
 - Alokasi : 15 kg/RTS/bulan
 - Durasi Penyaluran : 12 bulan/12 kali
 - HPP Gabah : Rp4.650,-
 - HPP Beras : Rp7.300,-

- HPB : Rp8.770,-/kg
- Harga tebus : Rp1.600,-/kg
- Subsidi harga : Rp7.170,-/kg

b. *Margin Fee* sebesar **Rp50.806.350.000,-** terdiri dari:

- Kuantum Raskin : 1.016.127.000 kg
- Tarif *Margin* : Rp50,-/kg

c. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar **Rp2.500.000.000.000,-**.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan membahas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Komisi IV DPR RI sepakat agar Pemerintah mengembalikan alokasi anggaran dan Rumah Tangga Sasaran ke dalam alokasi Rastra sampai Panitia Kerja Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengevaluasi kelayakan pelaksanaan BPNT.
6. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah agar pemasukan/impor terkait dengan komoditas pertanian seperti *raw sugar*, gandum, bawang putih, dan lain-lain wajib dilakukan oleh Perum BULOG (terkait dengan impor gandum untuk produsen pakan).
7. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q Perum Bulog untuk dapat menata manajemen perberasan dan manajemen pangan yang dapat menguntungkan para petani namun juga tidak merugikan konsumen.
8. Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Perum BULOG untuk mengadakan workshop mengenai pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT).